

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Mendasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Sementara pada pasal 71 menyatakan bahwa LKPJ Gubernur disampaikan oleh Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyusunan LKPJ secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 merupakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur tahun ke 5 (lima) dari pelaksanaan RPJMD 2013-2018.

LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2018 sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban Gubernur atas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi tahun 2018 yang diharapkan dapat memberikan informasi khususnya kepada DPRD tentang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan penyampaian LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah, diharapkan ada umpan balik berupa catatan dan rekomendasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah TA 2018, sebagai bahan masukan dalam penyelenggaraan pemerintah tahun-tahun berikutnya.

#### **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018; dan
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.

## C. GAMBARAN UMUM DAERAH

### 1. Kondisi Geografi

Provinsi Jawa Tengah terletak di  $5^{\circ}40'$  -  $8^{\circ}30'$  Lintang Selatan dan  $108^{\circ}30'$  -  $111^{\circ}30'$  Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 Ha atau 25,04 % dari luas Pulau Jawa. Secara administratif, letak wilayahnya berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 753 Kelurahan. Batas administrasi Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

**Gambar 1.1. Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah**

### 2. Kondisi Demografi

Berdasarkan proyeksi BPS, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebanyak 34.490.835 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kabupaten Brebes sebanyak 1.802.829 jiwa, diikuti Kota Semarang sebanyak 1.786.114 jiwa dan Kabupaten Cilacap sebanyak 1.719.504 jiwa. Jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kota Magelang sebanyak 121.872 jiwa diikuti Kota Salatiga sebanyak 191.571 jiwa dan kemudian Kota Tegal sebanyak 249.003 jiwa. Kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah sebesar 1.052 jiwa/km<sup>2</sup> dengan wilayah terpadat di Kota Surakarta sebesar 11.256 jiwa/km<sup>2</sup>, diikuti Kota Magelang sebesar 7.589 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kota Pekalongan sebesar 6.729 jiwa/km<sup>2</sup> serta yang paling rendah kepadatannya adalah Kabupaten Bora yaitu sebesar 478 jiwa/km<sup>2</sup>, diikuti oleh Kabupaten Wonogiri sebesar 534 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kabupaten Purworejo sebesar 656 jiwa/km<sup>2</sup>.

Struktur penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 23.363.185 jiwa, lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) sebanyak 11.127.650 jiwa.

Jumlah penduduk Jawa Tengah yang berusia 15 tahun keatas bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan menempati persentase tertinggi yaitu 27,28% atau sebanyak 4,76 juta jiwa, kemudian disusul sektor perdagangan rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 25,64% atau 4,48 juta dan selanjutnya sektor industri sebesar 21,49% atau 3,75 juta jiwa. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan bila dibanding dengan Tahun 2017, yaitu pada Tahun 2017 sebanyak 4,97 juta jiwa atau 28,51%, menurun menjadi 4,76 juta jiwa atau 27,28% pada Tahun 2018. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja di sektor perdagangan dan industri mengalami kenaikan, yaitu di sektor perdagangan pada Tahun 2017 sebanyak 23,64% atau 4,12 juta jiwa meningkat menjadi 25,64 % atau 4,48 juta jiwa pada Tahun 2018. Penduduk yang bekerja di sektor industri mengalami peningkatan dari 3,60 juta jiwa atau 20,64% pada Tahun 2017 menjadi 3,75 juta jiwa atau 21,49%.

### **3. Kondisi Perekonomian**

#### **a. Potensi Unggulan Daerah**

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2018 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha seperti tahun sebelumnya. Lapangan usaha yang mendominasi ekonomi Jawa Tengah yaitu: industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 34,50%; pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 14,04%; serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi 13,51%.

Pengembangan sektor industri di Jawa Tengah dikonstruksi oleh produk-produk unggulan yaitu: tekstil dan produk tekstil, batik, kayu olahan, logam dan permesinan, kerajinan dan makanan olahan. Pengembangan produk unggulan batik beriring dengan pengembangan produk unggulan pendukung berupa kerajinan ukir, serta tenun dan bordir.

Sektor pertanian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Pada sub sektor tanaman pangan, potensi daerah diarahkan untuk pemenuhan produksi komoditas utama tanaman pangan yaitu: padi, jagung dan kedelai. Pada sub sektor hortikultura, komoditas unggulan yang dikembangkan yaitu bawang merah dan cabai besar. Adapun untuk sub sektor perkebunan, komoditas unggulan yaitu tebu dan kelapa.

Sub sektor peternakan, komoditas utama yang dikembangkan berdasarkan master plan pengembangan peternakan Jawa Tengah yang disusun Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu: sapi potong, kerbau, sapi perah, kambing, domba, ayam lokal dan itik.

Sub sektor perikanan, komoditas unggulan yang dikembangkan berdasarkan potensi yang dimiliki Jawa Tengah adalah komoditas udang windu dan vanamei, nila, bandeng, lele, gurami, tawes, kerapu, karper, rumput laut dan nila salin. Perdagangan sebagai salah satu sektor unggulan dan penyumbang dalam perekonomian Jawa Tengah senantiasa dikembangkan melalui peningkatan distribusi barang, pengembangan akses dan informasi pasar, serta revitalisasi pasar rakyat.

## b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar 5,32% meningkat dari tahun 2017, yaitu 5,26%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada periode tersebut juga lebih tinggi dibanding nasional yang tumbuh 5,17%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 12,39% diikuti jasa perusahaan sebesar 9,48% dan jasa lainnya yang tumbuh 9,45%.

Dua lapangan usaha unggulan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Tengah, yaitu: industri pengolahan dan pertanian, kehutanan, dan perikanan, mengalami pertumbuhan yang menguat dibandingkan dengan tahun 2017. Lapangan usaha industri pengolahan tahun 2018 tumbuh 4,35%, menguat 0,02 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,33%. Sementara lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 2,63%, menguat 0,97 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 1,66%. Data Pertumbuhan Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2018 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1.**

### **Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha yang berkontribusi terhadap Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2017-2018**

| NO | LAPANGAN USAHA   | PROSENTASE PERTUMBUHAN (%) |       |
|----|--|----------------------------|-------|
|    |  | 2017                       | 2018  |
| 1  | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 1,66                       | 2,63  |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                                    | 5,19                       | 2,45  |
| 3  | Industri Pengolahan  | 4,33                       | 4,35  |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 5,22                       | 5,36  |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 6,51                       | 4,88  |
| 6  | Konstruksi   | 7,13                       | 6,07  |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 6,01                       | 5,70  |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                   | 6,30                       | 7,55  |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 6,45                       | 8,17  |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                       | 13,27                      | 12,39 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 5,17                       | 3,58  |
| 12 | Real Estate  | 6,48                       | 5,58  |
| 13 | Jasa Perusahaan  | 8,72                       | 9,48  |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,57                       | 4,43  |
| 15 | Jasa Pendidikan  | 6,97                       | 7,76  |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 8,60                       | 8,80  |
| 17 | Jasa lainnya   | 8,98                       | 9,45  |
|    | PDRB   | 5,26                       | 5,32  |

*Sumber: BPS Jateng, 2018 diolah*

Dari tabel 1.1 diatas dapat kita lihat bahwa lapangan usaha informasi dan Komunikasi masih mengalami prosentasi pertumbuhan tertinggi di antara 17 lapangan usaha yang berkontribusi terhadap perekonomian Jawa Tengah. Fenomena ini disebabkan karena penggunaan data Internet untuk media sosial, transaksi *online*, dan sebagainya konsisten meningkat. Perkembangan teknologi yang diikuti dengan meningkatnya kesadaran teknologi masyarakat mendorong penggunaan teknologi informasi dalam berbagai macam kegiatan usaha. Tidak hanya pelaku usaha, pemanfaatan teknologi oleh instansi pemerintah juga meningkat, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah semakin gencar dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugasnya, seperti melalui pengembangan aplikasi *mobile* berbasis Android. Sementara itu, di tahun 2018 prosentase pertumbuhan lapangan usaha konstruksi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 7,13% ditahun 2017 menjadi 6,07% ditahun 2018 (yoy). Hal ini terkait dengan jumlah hari kerja pada periode libur lebaran di Juni 2018 yang lebih panjang dibanding 2017.

Adapun PDRB dari sisi pengeluaran memperlihatkan bahwa semua komponen pengeluaran pada tahun 2018 tumbuh menguat, kecuali pengeluaran konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga selaku komponen yang paling dominan pada PDRB Pengeluaran tumbuh menguat dari 4,62% pada 2017 menjadi 4,69% pada tahun 2018. Peningkatan konsumsi rumah tangga ini didorong oleh terjaganya daya beli serta tambahan pendapatan berupa program sosial pemerintah dan kenaikan UMK tahun 2018. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan investasi dalam bentuk fisik (*fixed capital*) meningkat menjadi 7,68% pada tahun 2018, tahun sebelumnya tumbuh 7,50%. Pertumbuhan PMTB didorong oleh peningkatan investasi dalam bentuk barang modal, utamanya investasi tol trans Jawa, bandara, pelabuhan dan bendungan. Disisi lain, konsumsi pemerintah mengalami penurunan yang dipicu oleh realisasi Dana Desa dan Dana Insentif Daerah yang penyerapannya masih tergolong rendah

Komponen lainnya yang tumbuh cukup tinggi adalah ekspor dan impor. Ekspor produk dari Jawa Tengah ke luar negeri dan ke provinsi lain di Indonesia tumbuh 11,42% pada 2018, tahun sebelumnya hanya 7,39%. Adapun impor dari luar negeri dan dari provinsi lain tumbuh 12,42% di tahun yang sama. Lebih lengkap data Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2017-2018 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2.**  
**Pertumbuhan Jawa Tengah Menurut Komponen Pengeluaran**  
**Tahun 2017-2018**

| NO | KOMPONEN                            | PERSEN (%)  |             |
|----|-------------------------------------|-------------|-------------|
|    |                                     | 2017        | 2018        |
| 1  | Konsumsi Rumah tangga               | 4,62        | 4,69        |
| 2  | Konsumsi LNPRT                      | 4,43        | 7,62        |
| 3  | Konsumsi Pemerintah                 | 3,07        | 2,98        |
| 4  | Pembentukan Modal Tetap Bruto       | 7,50        | 7,68        |
| 5  | Perubahan Inventori                 | 4,97        | 5,92        |
| 6  | Ekspor Luar Negeri dan Antar Daerah | 7,39        | 11,42       |
| 7  | Impor Luar Negeri dan Antar Daerah  | 7,87        | 12,42       |
|    | <b>PDRB</b>                         | <b>5,26</b> | <b>5,32</b> |

*Sumber : BPS Jateng, 2018*

Tabel 1.2. diatas menunjukkan nilai impor yang meingkat di tahun 2018 yang berkorelasi positif dengan kenaikan investasi berupa pembangunan pabrik-pabrik maupun infrastruktur lainnya. Meningkatnya impor barang modal terutama berupa mesin-mesin yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan PLTU serta investasi pembelian mesin oleh swasta. Komponen mesin dan perlengkapannya yang paling banyak diimpor meliputi impor mesin pembangkit, alat listrik dan alat telekomunikasi.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2018 dibandingkan dengan provinsi di Jawa lainnya dapat dilihat pada tabel 1.3. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada periode tersebut menguat bersama dengan provinsi-provinsi lainnya di Jawa kecuali DKI Jakarta yang melemah.

**Tabel 1.3.**  
**Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2018**

| NO | PROVINSI/NASIONAL | PERSEN (%)  |             |
|----|-------------------|-------------|-------------|
|    |                   | 2017        | 2018        |
| 1  | DKI Jakarta       | 6,20        | 6,17        |
| 2  | Jawa Barat        | 5,35        | 5,64        |
| 3  | Jawa Tengah       | 5,26        | 5,32        |
| 4  | DIY               | 5,26        | 6,20        |
| 5  | Jawa Timur        | 5,46        | 5,50        |
| 6  | Banten            | 5,73        | 5,81        |
|    | <b>Nasional</b>   | <b>5,07</b> | <b>5,17</b> |

*Sumber : BPS Jateng, 2018*

### c. Sumber Pertumbuhan PDRB

Sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2018 dari sisi lapangan usaha disumbang oleh industri pengolahan sebesar 1,50% disusul dengan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,82% serta konstruksi sebesar 0,63%. Sedangkan pertanian yang termasuk lapangan usaha unggulan menyumbang 0,35% terhadap total pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Keempat lapangan usaha unggulan tersebut menyumbang 3,31% dari 5,32% pertumbuhan yang terjadi di Jawa Tengah tahun 2018. Tabel 1.4. memperlihatkan sumber pertumbuhan menurut lapangan usaha secara lengkap.

**Tabel 1.4.**

#### **Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2018**

| LAPANGAN USAHA |  | PERSEN (%)  |             |
|----------------|--|-------------|-------------|
|                |  | 2017        | 2018        |
| 1              | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 0,23        | 0,35        |
| 2              | Pertambangan dan Penggalian                                    | 0,12        | 0,06        |
| 3              | Industri Pengolahan  | 1,51        | 1,50        |
| 4              | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,01        | 0,01        |
| 5              | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,00        | 0,00        |
| 6              | Konstruksi   | 0,73        | 0,63        |
| 7              | Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor     | 0,86        | 0,82        |
| 8              | Transportasi dan Pergudangan                                   | 0,21        | 0,25        |
| 9              | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 0,20        | 0,26        |
| 10             | Informasi dan Komunikasi                                       | 0,56        | 0,56        |
| 11             | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 0,14        | 0,10        |
| 12             | Real Estate  | 0,12        | 0,11        |
| 13             | Jasa Perusahaan  | 0,03        | 0,04        |
| 14             | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 0,07        | 0,12        |
| 15             | Jasa Pendidikan  | 0,26        | 0,29        |
| 16             | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 0,07        | 0,07        |
| 17             | Jasa lainnya   | 0,14        | 0,15        |
|                | <b>PDRB</b>  | <b>5,26</b> | <b>5,32</b> |

*Sumber : BPS Jateng, 2018*



Dari sisi PDRB Pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari komponen ekspor luar negeri dan antar daerah sebesar 4,21%. Selanjutnya berasal dari konsumsi rumah tangga (2,79%) dan PMTB (2,27%). Jika tanpa impor luar negeri dan antar daerah, potensi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah cukup tinggi yaitu 9,60% yang merupakan sumbangan dari semua komponen pengeluaran kecuali impor. Artinya bahwa ketika impor mampu ditekan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dapat terdorong lebih tinggi.

**Tabel 1.5.**  
**Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2017-2018**

| NO | KOMPONEN                            | PERSEN (%)  |             |
|----|-------------------------------------|-------------|-------------|
|    |                                     | 2017        | 2018        |
| 1  | Konsumsi Rumah Tangga               | 2,77        | 2,79        |
| 2  | Konsumsi LNPRT                      | 0,04        | 0,08        |
| 3  | Konsumsi Pemerintah                 | 0,21        | 0,20        |
| 4  | Pembentukan Modal Tetap Bruto       | 2,18        | 2,27        |
| 5  | Perubahan Inventori                 | 0,04        | 0,05        |
| 6  | Ekspor Luar Negeri dan Antar Daerah | 2,67        | 4,21        |
| 7  | Impor Luar Negeri dan Antar Daerah  | 2,65        | 4,28        |
|    | <b>PDRB</b>                         | <b>5,26</b> | <b>5,32</b> |

*Sumber : BPS Jateng, 2018*

#### d. Distribusi PDRB

Kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB Jawa Tengah tahun 2018 adalah pada lapangan usaha industri pengolahan sebesar 34,50% disusul oleh pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14,04% dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,51% serta konstruksi sebesar 10,73%. Secara keseluruhan keempat kategori tersebut mempunyai kontribusi 72,78% dalam PDRB Jawa Tengah.

Khusus lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan lapangan usaha paling banyak menyerap pekerja, kontribusinya mengalami penurunan dari 14,38% pada tahun 2017 menjadi 14,04%. Dengan kata lain ada pengurangan kontribusi sebesar 0,34 poin. Secara lengkap, struktur PDRB Jawa Tengah Tahun 2017-2018 menurut lapangan usaha, dapat dilihat pada Tabel 1.6.

**Tabel 1.6.**  
**Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2018**

| KATEGORI | STRUKTUR (%)   |            |            |
|----------|--|------------|------------|
|          |  | 2017       | 2018       |
| A        | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                             | 14,38      | 14,04      |
| B        | Pertambangan dan Penggalian                                    | 2,56       | 2,59       |
| C        | Industri Pengolahan  | 34,63      | 34,50      |
| D        | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,10       | 0,10       |
| E        | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang        | 0,06       | 0,06       |
| F        | Konstruksi   | 10,49      | 10,73      |
| G        | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 13,53      | 13,51      |
| H        | Transportasi dan Pergudangan                                   | 3,11       | 3,12       |
| I        | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 3,09       | 3,11       |
| J        | Informasi dan Komunikasi                                       | 3,34       | 3,47       |
| K        | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 2,98       | 2,95       |
| L        | Real Estate  | 1,69       | 1,69       |
| M,N      | Jasa Perusahaan  | 0,38       | 0,40       |
| O        | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,82       | 2,75       |
| P        | Jasa Pendidikan  | 4,41       | 4,50       |
| Q        | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 0,88       | 0,89       |
| R,S,T,U  | Jasa lainnya   | 1,56       | 1,59       |
|          | <b>PDRB</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> |

*Sumber : BPS Jateng, 2018*

Kontribusi lapangan usaha unggulan di Jawa Tengah terhadap lapangan usaha yang sama pada level nasional tersaji pada tabel 1.7. Industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang kontribusinya meningkat pada level nasional, yaitu meningkat dari 14,82% pada tahun 2017 menjadi 14,85% pada tahun 2018. Peningkatan peranan industri pengolahan di level nasional menunjukkan bahwa pembangunan lapangan usaha tersebut memberikan hasil yang baik.

**Tabel 1.7.**  
**Kontribusi Pertanian, Industri, Perdagangan dan Konstruksi**  
**Jawa Tengah terhadap Nasional Tahun 2017-2018 (%)**

| Lap Usaha Unggulan | 2017  | 2018  |
|--------------------|-------|-------|
| Pertanian          | 9,43  | 9,37  |
| Industri           | 14,82 | 14,85 |
| Konstruksi         | 8,72  | 8,71  |
| Perdagangan        | 8,97  | 8,87  |

*Sumber : BPS Jateng, 2018*

Berdasarkan PDRB Pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih mendominasi dengan peranan 60,58% pada Tahun 2018, disusul Ekspor Luar Negeri dan Antar Daerah sebesar 42,40% dan PMTB yang berperan 32,61%. Peranan konsumsi rumah tangga sedikit lebih rendah dari tahun 2017 yang besarnya 60,93%. Peningkatan kontribusi PMTB sebanyak 1,33 poin dari 31,28% menjadi 32,61% menunjukkan bahwa pada tahun 2018 investasi di Jawa Tengah meningkat cukup signifikan.

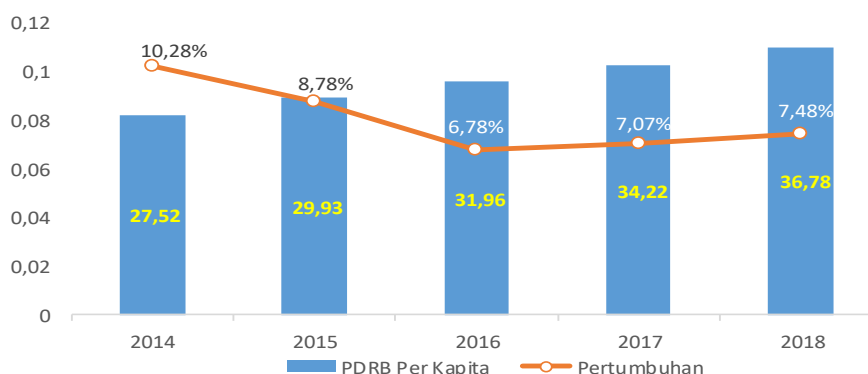
**Tabel 1.8.**  
**Struktur PDRB Menurut Pengeluaran**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2018**

| KOMPONEN    |                                     | STRUKTUR (%) |            |
|-------------|-------------------------------------|--------------|------------|
|             |                                     | 2017         | 2018       |
| 1           | Konsumsi Rumah Tangga               | 60,93        | 60,58      |
| 2           | Konsumsi LNPRT                      | 1,12         | 1,14       |
| 3           | Konsumsi Pemerintah                 | 8,04         | 7,78       |
| 4           | Pembentukan Modal Tetap Bruto       | 31,28        | 32,61      |
| 5           | Perubahan Inventori                 | 0,82         | 1,24       |
| 6           | Ekspor Luar Negeri dan Antar Daerah | 39,59        | 42,40      |
| 7           | Impor Luar Negeri dan Antar Daerah  | 41,78        | 45,75      |
| <b>PDRB</b> |                                     | <b>100</b>   | <b>100</b> |

Sumber : BPS Jateng, 2018

#### e. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Jawa Tengah atas dasar harga berlaku pada Tahun 2018 sebesar Rp36,78 juta meningkat sebesar 7,48% dibanding PDRB per kapita Tahun 2017 sebesar Rp34,22 juta. Mulai tahun 2016, trend pertumbuhan PDRB Perkapita Jawa Tengah menunjukkan penguatan. Gambar 1.2. memperlihatkan hal itu.



**G**  
**Grafik 1.1. PDRB Perkapita Jateng (Rp Juta) dan Pertumbuhannya**  
**Tahun 2014-2018**

## f. Inflasi

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 mampu mengendalikan inflasi di bawah tiga persen. Pada tahun tersebut besaran inflasi yang terjadi hanya 2,82%, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2017, yaitu 3,71%. Inflasi Jawa Tengah juga lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang besarnya 3,13%. Di antara provinsi di pulau Jawa, besaran inflasi Jawa Tengah terendah kedua setelah DIY dengan besaran inflasi 2,66%. Perkembangan inflasi Jawa Tengah dibandingkan dengan Provinsi se-Jawa dan Nasional Tahun 2016-2018 dapat dilihat pada Tabel 1.9.

**Tabel 1.9.**

**Perkembangan Inflasi Tahun 2016-2018**

| NO | PROVINSI/NASIONAL | Inflasi (%) |      |      |
|----|-------------------|-------------|------|------|
|    |                   | 2016        | 2017 | 2018 |
| 1  | DKI Jakarta       | 2,37        | 3,72 | 3,27 |
| 2  | Banten            | 2,94        | 3,98 | 3,42 |
| 3  | Jawa Barat        | 2,75        | 3,63 | 3,54 |
| 4  | Jawa Tengah       | 2,36        | 3,71 | 2,82 |
| 5  | DIY               | 2,29        | 4,20 | 2,66 |
| 6  | Jawa Timur        | 2,74        | 4,04 | 2,86 |
|    | Nasional          | 3,02        | 3,61 | 3,13 |

*Sumber : BPS Jateng, 2018*

Kontributor terbesar penurunan laju inflasi Jawa Tengah tahun 2018 adalah kelompok Bahan Makanan disumbang oleh sub kelompok Padi-padian, Umbi-umbian dan hasilnya. Hal ini dipicu oleh periode panen padi masa tanam April-September 2018 yang menjamin tingginya pasokan beras yang selanjutnya berdampak pada penurunan harga komoditas beras.

## g. Ekspor dan Impor

Selama tahun 2018 nilai ekspor total Jawa Tengah mencapai 6.587,77 juta US\$ atau naik 9,95 % dibandingkan dengan tahun 2017 yang nilainya 5.991,37 juta US\$. Ekspor Jawa Tengah didominasi oleh barang non migas dengan porsi 97,72% terhadap ekspor. Pada tahun 2018, ekspor non migas Jawa Tengah mencapai 6.437,42 juta US\$, atau naik 11,62% dibanding tahun 2017 yang nilainya 5.767,44 juta US\$. Komoditas non migas utama yang mempunyai nilai ekspor tertinggi antara lain produk dan barang tekstil, kayu dan kayu olahan, serta bermacam barang hasil industri dengan negara tujuan utama yaitu: Amerika Serikat, Jepang dan Tiongkok.

Adapun impor Jawa Tengah pada tahun 2018 mencapai 14.779,38 juta US\$ atau naik 38,67% dibandingkan dengan tahun 2017. Impor Jawa Tengah didominasi impor non migas sebanyak 61,87%. Pada tahun 2018, impor non migas Jawa Tengah mencapai 9.144,12 juta US\$ atau naik 41,32% dibandingkan

kondisi tahun 2017 yang besarnya 6.470,59 juta US\$ dan belum mencapai target yaitu 5.729 juta US\$. Negara pemasok barang impor terbesar ke Jawa Tengah adalah Tiongkok, Arab Saudi, dan Nigeria. Komoditas impor utama meliputi produk mineral, pesawat mekanik, serta tekstil dan barang.

**Tabel 1.10.**

**Nilai Ekspor dan Impor Jawa Tengah Tahun 2017-2018**

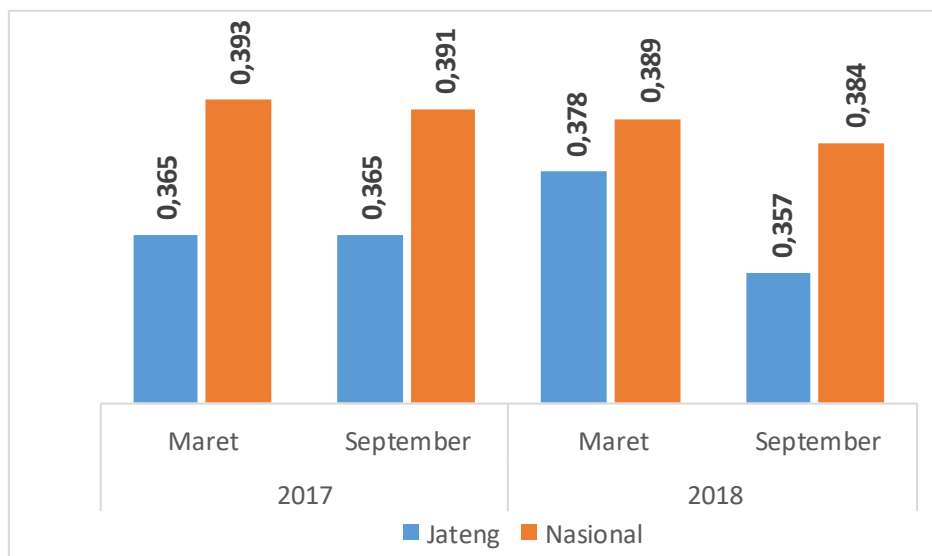
| <b>Uraian</b> | <b>Tahun 2017<br/>(Juta US \$)</b> | <b>Tahun 2018<br/>(Juta US\$)</b> | <b>Perkembangan<br/>2018 – 2017<br/>(Juta US\$)</b> |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| <b>Ekspor</b> | <b>5 991 ,37</b>                   | <b>6 587 ,77</b>                  | <b>596.40</b>                                       |
| - Migas       | 223 ,93                            | 150 ,35                           | (73.58)   |
| - Non Migas   | 5 767 ,44                          | 6 437 ,42                         | 669.98  |
| <b>Impor</b>  | <b>10 658 ,25</b>                  | <b>14 779 ,38</b>                 | <b>4,121.14</b>                                     |
| - Migas       | 4 187 ,66                          | 5 635 ,27                         | 1,447.61  |
| - Non Migas   | 6 470 ,59                          | 9 144 ,12                         | 2,673.53  |

*Sumber : BPS Jateng, 2018*

Hal yang harus digarisbawahi dari peningkatan impor Jawa Tengah adalah impor ini terutama dalam bentuk non bangunan, yaitu barang modal selain peralatan transportasi dan aksesoris barang modal untuk kepentingan industri. Hal tersebut juga tercermin dari pertumbuhan impor komoditas mesin dan alat transportasi. Berdasarkan komoditasnya, peningkatan impor permesinan terutama berupa mesin pembangkit listrik, mesin industri dan perlengkapan, dan mesin listrik, aparat dan peralatannya. Peningkatan impor barang modal ini sejalan dengan menguatnya kinerja investasi non bangunan pada periode laporan, terutama terkait dengan penyelesaian investasi pembangkit listrik di sejumlah daerah di Jawa Tengah.

#### **h. Indeks Gini dan Indeks Williamson**

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Pada September 2018, Indeks Gini Jawa Tengah mencapai 0,357 dibanding bulan September 2017 mengalami penurunan dengan besaran 0,08 poin. Dibandingkan dengan Nasional, indeks Gini Jawa Tengah masih jauh lebih rendah. Pada September 2018, indeks Gini nasional sebesar 0,384 sedangkan Jawa Tengah 0,357. Ini berarti bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk di Jawa Tengah semakin membaik dan lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Gambar 1.3 memperlihatkan perbandingan Indeks Gini Jawa Tengah dengan Nasional.



**Grafik 1.2. Perbandingan Indeks Gini Jawa Tengah dengan Nasional Maret 2017 – September 2018**

Indeks Gini penduduk Jawa Tengah di Perkotaan jauh lebih besar dibandingkan dengan pedesaan. Pada September 2018, indeks Gini penduduk Jawa Tengah di Pedesaan sebesar 0,315 sedangkan untuk perkotaan sebesar 0,377. Artinya bahwa masalah ketimpangan pendapatan terutama terjadi di perkotaan. Meskipun demikian, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Jawa Tengah dari Maret 2017 cenderung menurun, baik penduduk yang di pedesaan maupun perkotaan (lihat Tabel 1.11).

**Tabel 1.11.**

**Gini Rasio Jawa Tengah Menurut Desa – Kota Tahun 2017 – 2018**

| Uraian    | 2017  |           | 2018  |           |
|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
|           | Maret | September | Maret | September |
| Desa      | 0.327 | 0.323     | 0.336 | 0.315     |
| Kota      | 0.386 | 0.383     | 0.400 | 0.377     |
| Desa+Kota | 0.365 | 0.365     | 0.378 | 0.357     |

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018

Banyak upaya yang dilakukan dalam rangka menurunkan ketimpangan pendapatan penduduk di Jawa Tengah. Beberapa di antaranya adalah optimalisasi realisasi investasi yang menyerap banyak tenaga kerja dan pengembangan berbagai kawasan industri pendukungnya; pengembangan berbagai kegiatan pendukung sektor riil; optimalisasi pengembangan wirausaha baru dan fasilitasi akses perbankan bagi pelaku usaha; serta dukungan iklim usaha kondusif.

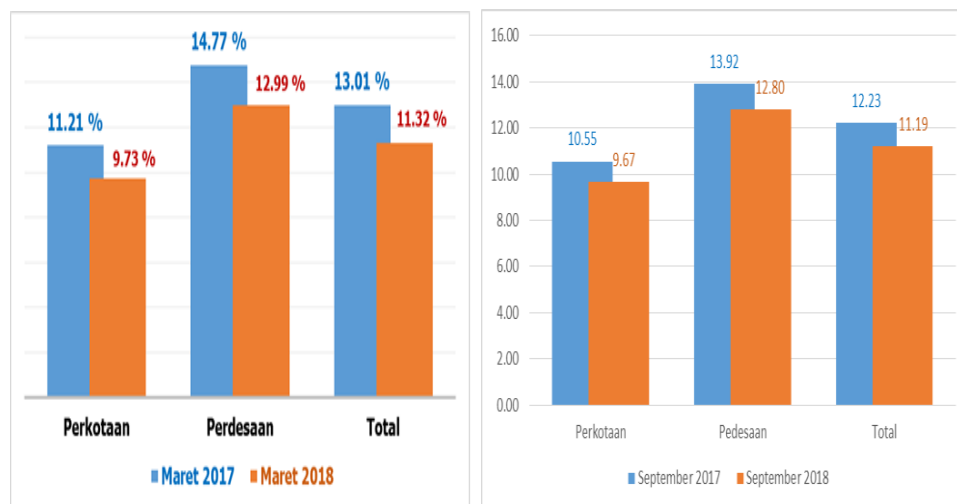
Kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat diukur dengan Indeks Williamson. Makin besar nilai Indeks Williamson suatu daerah menunjukkan makin timpang kesenjangan pembangunan antar wilayah. Nilai Indeks Williamson Jawa Tengah Tahun 2017 sebesar 0,6234, sedikit lebih tinggi dari angka capaian Tahun 2016 yaitu sebesar 0,6210.

Upaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut terus dilakukan, antara lain melalui alokasi bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa, pembangunan infrastruktur untuk mendorong investasi, pembangunan kawasan perbatasan serta pengembangan wilayah dengan melihat potensi unggulan daerah masing-masing.

#### i. Penduduk Miskin dan Pengangguran

Penduduk miskin di Jawa Tengah pada periode September 2018 sebanyak 3,867 juta jiwa atau 11,19%, mengalami penurunan sebanyak 330 ribu jiwa atau turun 1,04% dibandingkan September 2017 yaitu sebesar 12,23%. Penurunan persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah merupakan penurunan tertinggi se-Indonesia. Pada September 2018, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 11,19%, menurun 0,13% dibandingkan kondisi Maret 2018.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengupayakan Berbagai program maupun kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan mengurangi beban pengeluaran dan ketimpangan, meningkatkan pendapatan, pengembangan usaha kecil dan mikro, dan sinergitas serta peningkatan kerjasama penanganan lintas sektor, pelibatan swasta, perguruan tinggi, perbankan, unsur masyarakat, pemerintah pusat/kabupaten-kota.



**Grafik 1.3. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Menurut Perdesaan dan Perkotaan Periode Maret 2017 – September 2018**

Penurunan persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada periode September 2017 – September 2018 lebih besar terjadi di pedesaan yang turun sebesar 1,12% dari 13,92% pada September 2017 menjadi 12,80% pada September 2018. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyaluran bantuan,

pelaksanaan dan penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan telah dinikmati oleh orang miskin. Sedangkan pada wilayah perkotaan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,88% dari 10,55% pada September 2017 menjadi 9,67% pada September 2018 (Gambar 1.4 dan Tabel 1.12).

**Tabel 1.12.**

**Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Menurut Perdesaan dan Perkotaan Maret 2017 – September 2018**

| Periode   | 2017  |       |       | 2018 |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
|           | K     | D     | Total | K    | D     | Total |
| Maret     | 11.21 | 14.77 | 13.01 | 9.73 | 12.99 | 11.32 |
| September | 10,55 | 13,92 | 12,23 | 9,67 | 12,80 | 11,19 |

*Sumber : BPS Jateng, 2018*

Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dilakukan dengan berbagai program perlindungan sosial diantaranya melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Jateng Sejahtera (KJS), jaminan kesehatan masyarakat, Kartu Tani dan Kartu Nelayan, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan subsidi listrik murah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dilakukan melalui intervensi pemberdayaan kepala rumah tangga produktif yang difokuskan pada sektor pertanian, pengolahan hasil, dan pemasaran produk dengan didukung peningkatan kesempatan perluasan serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dalam rangka pengembangan usaha mikro kecil dilakukan dengan bantuan ekonomi produktif, peningkatan akses permodalan dengan bunga rendah, pendampingan usaha dan pemasaran, pengembangan kewirausahaan desa. Disamping itu, dilakukan pula pengembangan infrastruktur desa, peningkatan akses air minum, sanitasi lingkungan, dan stimulasi pemugaran RTLH. Adapun perbandingan persentase penduduk miskin se-Jawa periode September 2017 – 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.13.

**Tabel 1.13.**

**Perbandingan Persentase Penduduk Miskin se-Jawa Periode September 2017 & September 2018**

| No | Provinsi/Nasional | 2017  | 2018  |
|----|-------------------|-------|-------|
|    |                   | %     | %     |
| 1  | DKI Jakarta       | 3,78  | 3,55  |
| 2  | Jawa Barat        | 7,83  | 7,25  |
| 3  | Jawa Tengah       | 12,23 | 11,19 |
| 4  | DI Yogyakarta     | 12,36 | 11,81 |
| 5  | Jawa Timur        | 11,20 | 10,85 |
| 6  | Banten            | 5,59  | 5,25  |
|    | Nasional          | 10,12 | 9,66  |

*Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018 (Kondisi September 2017 dan 2018)*



Berdasarkan kondisi data terakhir yang dikeluarkan BPS tingkat kemiskinan kabupaten/kota yaitu Maret 2018, persentase penduduk miskin di semua kab/kota di Jawa Tengah mengalami penurunan dibanding kondisi Maret 2017 dengan range penurunan antara 0,23–3,55 poin. Penurunan tertinggi terjadi di Kabupaten Banyumas yang turun 3,55 poin, selanjutnya diikuti oleh Purbalingga turun sebesar 3,18 poin, Kabupaten Rembang turun 2,94 poin, Kabupaten Wonosobo turun 2,74 poin, dan Kabupaten Cilacap turun sebesar 2,69 poin, secara rinci dapat dicermati pada Tabel 1.14.

**Tabel 1.14.**

**Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode Maret 2017 – 2018 (%)**

| Kode | Kab/Kot           | Maret 2017 | Maret 2018 | Perubahan |
|------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 1    | Kab. Cilacap      | 13,94      | 11,25      | -2.69     |
| 2    | Kab. Banyumas     | 17,05      | 13,50      | -3.55     |
| 3    | Kab. Purbalingga  | 18,80      | 15,62      | -3.18     |
| 4    | Kab. Banjarnegara | 17,21      | 15,46      | -1.75     |
| 5    | Kab. Kebumen      | 19,60      | 17,47      | -2.13     |
| 6    | Kab. Purworejo    | 13,81      | 11,67      | -2.14     |
| 7    | Kab. Wonosobo     | 20,32      | 17,58      | -2.74     |
| 8    | Kab. Magelang     | 12,42      | 11,23      | -1.19     |
| 9    | Kab. Boyolali     | 11,96      | 10,04      | -1.92     |
| 10   | Kab. Klaten       | 14,15      | 12,96      | -1.19     |
| 11   | Kab. Sukoharjo    | 8,75       | 7,41       | -1.34     |
| 12   | Kab. Wonogiri     | 12,90      | 10,75      | -2.15     |
| 13   | Kab. Karanganyar  | 12,28      | 10,01      | -2.27     |
| 14   | Kab. Sragen       | 14,02      | 13,12      | -0.90     |
| 15   | Kab. Grobogan     | 13,27      | 12,31      | -0.96     |
| 16   | Kab. Blora        | 13,04      | 11,90      | -1.14     |
| 17   | Kab. Rembang      | 18,35      | 15,41      | -2.94     |
| 18   | Kab. Pati         | 11,38      | 9,90       | -1.48     |
| 19   | Kab. Kudus        | 7,59       | 6,98       | -0.61     |
| 20   | Kab. Jepara       | 8,12       | 7,00       | -1.12     |
| 21   | Kab. Demak        | 13,41      | 12,54      | -0.87     |
| 22   | Kab. Semarang     | 7,78       | 7,29       | -0.49     |
| 23   | Kab. Temanggung   | 11,46      | 9,87       | -1.59     |
| 24   | Kab. Kendal       | 11,10      | 9,84       | -1.26     |
| 25   | Kab. Batang       | 10,80      | 8,69       | -2.11     |
| 26   | Kab. Pekalongan   | 12,61      | 10,06      | -2.55     |
| 27   | Kab. Pemalang     | 17,37      | 16,04      | -1.33     |
| 28   | Kab. Legal        | 9,90       | 7,94       | -1.96     |
| 29   | Kab. Brebes       | 19,14      | 17,17      | -1.97     |

| Kode | Kab/Kot         | Maret 2017 | Maret 2018 | Perubahan |
|------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 30   | Kota Magelang   | 8,75       | 7,87       | -0.88     |
| 31   | Kota Surakarta  | 10,65      | 9,08       | -1.57     |
| 32   | Kota Salatiga   | 5,07       | 4,84       | -0.23     |
| 33   | Kota Semarang   | 4,62       | 4,14       | -0.48     |
| 34   | Kota Pekalongan | 7,47       | 6,75       | -0.72     |
| 35   | Kota Tegal      | 8,11       | 7,81       | -0.30     |

*Sumber : BPS Jateng, 2018*

Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah periode Agustus 2018 sebesar 4,51% turun 0,06 poin dibandingkan dengan Agustus 2017 sebesar 4,57%. Dibandingkan dengan Nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah masih lebih rendah, yaitu untuk nasional 5,34%. Upaya yang telah dilakukan antara lain: menarik investor yang padat karya dengan cara memberi kemudahan dalam proses perizinan, peningkatan kapasitas keterampilan tenaga kerja di Balai Latihan Kerja, dan penyebarluasan informasi pasar kerja, serta pembinaan masyarakat penganggur melalui pengembangan kewirausahaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan provinsi se-Jawa periode Agustus 2017 – 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.15.

**Tabel 1.15.**

**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka se-Jawa  
Periode Agustus 2017 – 2018**

| <b>NO</b> | <b>PROVINSI/NASIONAL</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|-----------|--------------------------|-------------|-------------|
| 1         | DKI Jakarta              | 7,14        | 6,24        |
| 2         | Jawa Barat               | 8,22        | 8,17        |
| 3         | Jawa Tengah              | 4,57        | 4,51        |
| 4         | DI Yogyakarta            | 3,02        | 3,35        |
| 5         | Jawa Timur               | 4,00        | 3,99        |
| 6         | Banten                   | 9,28        | 8,52        |
|           | Nasional                 | <b>5,50</b> | <b>5,34</b> |

*Sumber : BPS Jateng, 2018 (Kondisi Agustus 2017 dan 2018)*

**j. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan instrumen ukur untuk melihat kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah dengan melihat data yang mencerminkan kemajuan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Perkembangan IPM Jawa Tengah yang dihitung berdasarkan metode baru dengan indikator: usia harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. IPM Jawa Tengah Tahun 2017 sebesar 70,52 mengalami kenaikan sebesar 0,54 poin dibandingkan Tahun 2016 namun masih sedikit dibawah IPM Nasional sebesar 70,81. Dengan perkembangan tersebut, status pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah sudah termasuk

dalam kategori tinggi (nilai IPM 70 – 80). Angka IPM 2018 sampai saat ini belum dirilis BPS.

Jika dilihat komponen pembentuk IPM, semuanya mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017, komponen IPM yang mengalami peningkatan tertinggi adalah *Purchasing Power Parity* (PPP) yang meningkat 2,21%. Selanjutnya diikuti oleh peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 1,68%. Peningkatan RLS Jawa Tengah pada tahun 2016 lebih rendah daripada peningkatan RLS secara nasional yang tumbuh 1,89%.

**Tabel 1.16**  
**IPM Jawa Tengah dan Nasional Serta Komponennya**

| Komponen      | Jateng |        |            | Nasional |        |            |
|---------------|--------|--------|------------|----------|--------|------------|
|               | 2016   | 2017   | Growth (%) | 2016     | 2017   | Growth (%) |
| UHH (Thn)     | 74,02  | 74,08  | 0,08       | 70,90    | 71,06  | 0,23       |
| HLS (Thn)     | 12,45  | 12,57  | 0,96       | 12,72    | 12,85  | 1,02       |
| RLS (Thn)     | 7,15   | 7,27   | 1,68       | 7,95     | 8,10   | 1,89       |
| PPP (Rp Ribu) | 10 153 | 10 377 | 2,21       | 10 420   | 10 664 | 2,34       |
| IPM           | 69,98  | 70,52  | 0,77       | 70,18    | 70,81  | 0,90       |

Keterangan: UHH: Usia Harapan Hidup; HLS: Harapan Lama Sekolah; RLS: Rata-rata Lama Sekolah; PPP: *Purchasing Power Parity*

Perkembangan IPM Jawa Tengah Tahun 2016-2017 dibandingkan dengan Provinsi tetangga dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 1.17.

**Tabel 1.17.**  
**Perkembangan IPM Tahun 2016-2017**

| NO | PROVINSI/NASIONAL | CAPAIAN IPM |       | PROSENTASE PERTUMBUHAN IPM (YOY) |
|----|-------------------|-------------|-------|----------------------------------|
|    |                   | 2016        | 2017  |                                  |
| 1  | DKI Jakarta       | 79,60       | 80,06 | 0,58                             |
| 2  | Jawa Barat        | 70,05       | 70,69 | 0,91                             |
| 3  | Jawa Tengah       | 69,98       | 70,52 | 0,77                             |
| 4  | DI Yogyakarta     | 78,38       | 78,89 | 0,65                             |
| 5  | Jawa Timur        | 69,74       | 70,27 | 0,76                             |
| 6  | Banten            | 70,96       | 71,42 | 0,65                             |
|    | Nasional          | 70,18       | 70,81 | 0,90                             |

Sumber : BPS Jateng, 2018 diolah

Sedangkan perkembangan IPM Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2016-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.18 sebagai berikut:

**Tabel 1.18.**  
**Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2016-2017**

| NO. | KAB/KOTA        | IPM   |       |
|-----|-----------------|-------|-------|
|     |                 | 2016  | 2017  |
| 1   | Cilacap         | 68,60 | 68,90 |
| 2   | Banyumas        | 70,49 | 70,75 |
| 3   | Purbalingga     | 67,48 | 67,72 |
| 4   | Banjarnegara    | 65,52 | 65,86 |
| 5   | Kebumen         | 67,41 | 68,29 |
| 6   | Purworejo       | 70,66 | 71,31 |
| 7   | Wonosobo        | 66,19 | 66,89 |
| 8   | Magelang        | 67,85 | 68,39 |
| 9   | Boyolali        | 72,18 | 72,64 |
| 10  | Klaten          | 73,97 | 74,25 |
| 11  | Sukoharjo       | 75,06 | 75,56 |
| 12  | Wonogiri        | 68,23 | 68,66 |
| 13  | Karanganyar     | 74,90 | 75,22 |
| 14  | Sragen          | 71,43 | 72,40 |
| 15  | Grobogan        | 68,52 | 68,87 |
| 16  | Blora           | 66,61 | 67,52 |
| 17  | Rembang         | 68,60 | 68,95 |
| 18  | Pati            | 69,03 | 70,12 |
| 19  | Kudus           | 72,94 | 73,84 |
| 20  | Jepara          | 70,25 | 70,79 |
| 21  | Demak           | 70,10 | 70,41 |
| 22  | Semarang        | 72,40 | 73,20 |
| 23  | Temanggung      | 67,60 | 68,34 |
| 24  | Kendal          | 70,11 | 70,62 |
| 25  | Batang          | 66,38 | 67,35 |
| 26  | Pekalongan      | 67,71 | 68,40 |
| 27  | Pemalang        | 64,17 | 65,04 |
| 28  | Tegal           | 65,84 | 66,44 |
| 29  | Brebes          | 63,98 | 64,86 |
| 30  | Kota Magelang   | 77,16 | 77,84 |
| 31  | Kota Surakarta  | 80,76 | 80,85 |
| 32  | Kota Salatiga   | 81,14 | 81,68 |
| 33  | Kota Semarang   | 81,19 | 82,01 |
| 34  | Kota Pekalongan | 73,32 | 73,77 |
| 35  | Kota Tegal      | 73,55 | 73,95 |
|     | Jawa Tengah     | 69,98 | 70,52 |

*Sumber : BPS Jateng, 2018*

### k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IPG di Jawa Tengah tahun 2013 – 2017 terus sebesar 91,94 masih di atas IPG nasional yaitu 90,96. Jika dibandingkan dengan capaian IPG di pulau Jawa dan Bali, Jawa Tengah menduduki posisi ke-4 setelah DKI Jakarta, DIY, dan Bali. Pada komponen pembentuk IPG yang masih jadi perhatian adalah capaian rata-rata lama sekolah perempuan dan pengeluaran per kapita. Kondisi capaian perkembangan IPG Kab/Kota terdapat 22 Kab/Kota diatas capaian provinsi dan 13 Kab/Kota di bawah provinsi.

Sedangkan IDG di Jawa Tengah tahun 2013-2017 mencapai 75,10, Capaian IDG berada diatas rata-rata Nasional (71,74) bahkan tertinggi se Jawa-Bali. Namun masih ada komponen pembentuk IDG yang menjadi perhatian yaitu keterlibatan perempuan di parlemen. Sedangkan kondisi capaian IDG Kab/Kota terdapat 9 Kab/Kota diatas capaian Provinsi dan 26 Kab/Kota dibawah capaian Provinsi. Data IPG dan IDG tahun 2018 sampai saat ini belum dirilis BPS.

### l. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk menilai kesejahteraan petani. NTP dihitung melalui perbandingan kemampuan tukar barang-barang produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. NTP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 sebesar 102,25. Bila dibandingkan dengan NTP 2017 sebesar 100,40 maka mengalami peningkatan sebesar 1,85 poin. Jika dibandingkan dengan nasional (102,46), NTP Jawa Tengah tahun 2018 lebih rendah meskipun tidak terlalu jauh berbeda, hanya selisih 0,21 poin. Meskipun demikian, NTP Jawa Tengah masih lebih tinggi dibandingkan dengan NTP DKI Jakarta, Banten dan DIY, data selengkapnya sebagaimana pada Tabel 1.19.

**Tabel 1.19.**

**Nilai Tukar Petani Tahun 2017-2018**

| NO | PROVINSI/NASIONAL | NTP    |        |
|----|-------------------|--------|--------|
|    |                   | 2017   | 2018   |
| 1  | DKI Jakarta       | 98,29  | 99,38  |
| 2  | Banten            | 99,75  | 99,70  |
| 3  | Jawa Barat        | 104,93 | 109,01 |
| 4  | Jawa Tengah       | 100,40 | 102,25 |
| 5  | DIY               | 102,08 | 100,77 |
| 6  | Jawa Timur        | 104,10 | 106,62 |
|    | Nasional          | 101,28 | 102,46 |

*Sumber : BPS Jateng, 2018 (merupakan angka Rata-rata)*

Perbaikan NTP Jawa Tengah ini sejalan dengan peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang pada tahun 2018 mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,63% yang lebih tinggi dibandingkan dengan prosentase pertumbuhannya di tahun 2017 yang tercatat sebesar 1,66% (yoy).

#### **D. SISTEMATIKA**

LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dengan sistematika:

**Bab I : Pendahuluan**

Memuat tentang penjelasan umum mengenai dasar hukum, gambaran umum daerah meliputi kondisi geografis, kondisi demografis dan kondisi ekonomi.

**Bab II : Kebijakan Pemerintahan Daerah**

Memuat tentang Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan serta Prioritas Daerah.

**Bab III : Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

Memuat tentang pengelolaan pendapatan daerah, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, target dan realisasi pendapatan, serta pengelolaan belanja meliputi kebijakan umum keuangan, target dan realisasi belanja, serta pembiayaan daerah.

**Bab IV : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Memuat tentang pelaksanaan Urusan Wajib pelayanan dasar, Urusan Wajib bukan pelayanan dasar, Urusan Pilihan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

**Bab V : Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

Memuat tentang pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima dan pencapaian kinerja pada kegiatan yang bersumber dari APBN.

**Bab VI : Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan**

Memuat tentang pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

**Bab VII : Penutup**

Memuat penutup atas LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2018.